

BAB II

KEBANGKITAN TIONGKOK DAN MEDIASI KONFLIK

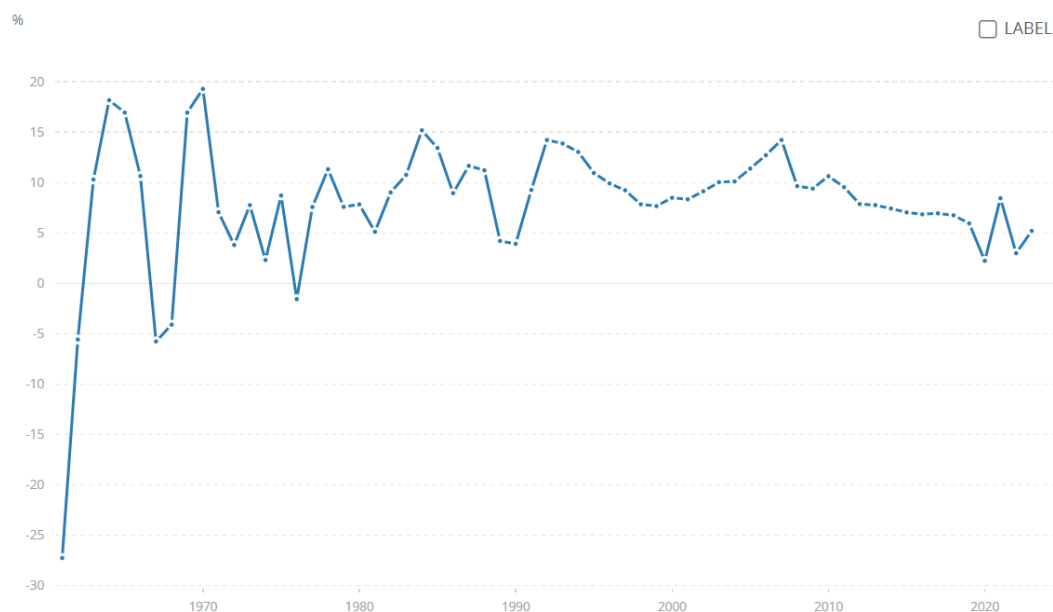
DI KAWASAN TIMUR TENGAH

Selama beberapa dekade terakhir Tiongkok menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tiongkok berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca kegagalan kebijakan pemerintahan Mao Zedong yaitu *Great Leap Forward* (1958–1961) dan *Cultural Revolution* (1966–1969). Pada tahun 2011, jumlah investasi asing langsung Tiongkok mencapai 105 miliar USD yang mana merupakan jumlah tertinggi yang pernah dicapai oleh semua negara. Pada tahun yang sama, Tiongkok menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Hal ini tidak terlepas dari reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Deng Xiaoping pada tahun 1978. Kebijakan reformasi ekonomi mengubah sistem perekonomian Tiongkok dari terpusat atau tertutup menjadi terbuka terhadap dunia luar, dalam hal ini dunia internasional. Kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan istilah *Open Door Policy*. Sejak penerapan *Open Door Policy*, jumlah investasi asing langsung meningkat dan pertumbuhan PDB Tiongkok mencapai lebih dari 9% per tahun (Yueh, 2007).

Sistem ekonomi yang diterapkan Tiongkok disebut sebagai *Social Market Economy* yang mana merupakan perpaduan dari sosialisme ekonomi dan liberalisme. Dalam sistem ini, perusahaan swasta diberikan kebebasan untuk memproduksi beberapa komoditas karena perusahaan-perusahaan tersebut memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Meskipun perusahaan-perusahaan ini bersifat independen secara hukum, tetapi mereka harus

mematuhi peraturan pemerintah dan mendapatkan kontrol yang ketat dari Partai Komunis China. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan persaingan yang sehat, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengendalikan tingkat inflasi dan pengangguran, serta meningkatkan kondisi kerja, kesejahteraan sosial, dan kualitas pelayanan publik (Berger, Choi, & Herstein, 2013).

Gambar 2.1. Peningkatan PDB Tiongkok



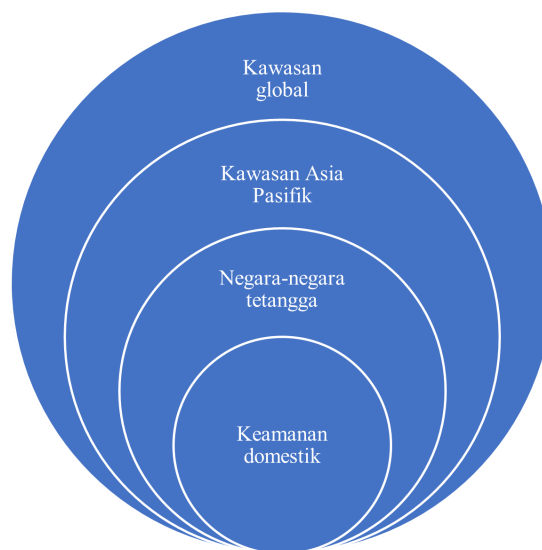
Sumber: World Bank, 2024.

2.1. Kebangkitan Tiongkok di Kawasan Timur Tengah

Hubungan antara Tiongkok dan negara-negara Timur Tengah dapat ditelusuri sejak masa dinasti dan kekaisaran. Pada saat itu hubungan antar negara didasari oleh kepentingan untuk berdagang lalu berkembang ke berbagai bidang seperti pertukaran budaya, peradaban, kepentingan ekonomi, penyebaran agama, serta kerjasama militer dan keamanan. Kedekatan historis antara Tiongkok dan negara-negara Timur Tengah menjadi pondasi yang kuat dalam pelaksanaan

hubungan kedua kawasan di abad ke-21. Kedekatan historis membuat Tiongkok memiliki citra positif yakni sebagai sahabat lama negara-negara Timur Tengah. Awalnya Tiongkok menganggap Timur Tengah sebagai kawasan yang tidak penting karena merupakan bagian dari terjauh dalam lingkaran keamanan konsentris Tiongkok. Tetapi sejak tahun 1990-an Tiongkok mulai menunjukkan ketertarikan terhadap kawasan Timur Tengah yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap sektor energi di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pasca berakhirnya perang dingin membuat Tiongkok ketergantungan terhadap energi sehingga Tiongkok mulai menjalin hubungan dengan negara-negara Timur Tengah yang kaya akan sumber daya energi seperti minyak bumi (Ehteshami & Horesh, 2020).

Gambar 2.2. Lingkaran Keamanan Konsentris Tiongkok



Sumber: Pieter, 2022

Gambar 2.1. menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki 4 lapis lingkaran keamanan konsentris. Dalam hal ini, Timur Tengah menempati posisi terakhir

yaitu kawasan global. Posisi tersebut tidak terlalu strategis apabila dibandingkan dengan kawasan lain seperti Asia Tenggara dan Asia Selatan sebagai negara yang berbatasan langsung atau AS sebagai kompetitor. Timur Tengah menjadi strategis bagi Tiongkok apabila kawasan tersebut mengancam lingkaran inti atau keamanan domestik Tiongkok. Misalnya Konflik Arab Saudi dan Iran yang membuat kawasan Timur Tengah tidak stabil dan pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga minyak (Pieter, 2022). Kenaikan harga minyak mengancam keamanan domestik Tiongkok karena negara tersebut sangat bergantung pada minyak untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Aliran minyak menuju Tiongkok harus melewati Selat Hormuz yaitu selat kecil berukuran 21 mil yang mana memisahkan Iran dan Semenanjung Arab. Selat Hormuz menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia mengingat 1/5 minyak bumi dunia melewati selat tersebut setiap harinya (Dryad Global, 2024).

2.1.1. Hubungan Tiongkok dengan Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara yang berpengaruh di Timur Tengah dan cukup diperhitungkan di kancah internasional. Arab Saudi merupakan anggota GCC dan OPEC, serta satu-satunya negara Timur Tengah yang menjadi anggota G20. Arab Saudi merupakan mitra penting bagi Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Tetapi hubungan kedua negara mulai merenggang ketika AS berada di bawah kepemimpinan Obama yang mendukung *Arab Spring*. Sebagai negara monarki, Arab Saudi merasa bahwa *Arab Spring* akan mengancam kekuasaan kerajaan dan memicu munculnya gelombang protes dari masyarakat sipil. Maka dari itu Arab Saudi mulai menjalin hubungan dengan negara lain yang

dianggap memiliki pengaruh besar, salah satunya Tiongkok. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah *Manage Multi Dependence* dimana Arab Saudi berusaha menjalin hubungan luar negeri dengan negara-negara besar guna mengurangi ketergantungannya terhadap AS (Machmudi, 2020).

Hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Arab Saudi telah diresmikan sejak 21 Juli 1990. Hubungan kedua negara pada dasarnya didorong oleh kesesuaian kepentingan. Arab Saudi merupakan negara pemasok minyak terbesar di dunia sehingga perekonomian nasionalnya sangat bergantung pada ekspor minyak. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan minyak telah menyumbang lebih dari 70% pendapatan fiskal Arab Saudi. Sementara itu, Tiongkok membutuhkan pasokan minyak dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Hal ini membuat kedua negara menjadi mitra strategis, khususnya di bidang perdagangan energi. Pada tahun 2011, Tiongkok berada pada urutan pertama sebagai mitra dagang terbesar Arab Saudi. Kemudian pada tahun 2016 kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral mereka menjadi kemitraan strategis komprehensif. CSP memungkinkan terjadinya peningkatan kerja sama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, keuangan, dan teknologi. Arab Saudi merupakan negara Timur Tengah pertama yang menjalin kemitraan strategis komprehensif dengan Tiongkok (Ehteshami & Horesh, 2020).

Sebagai produsen minyak terbesar di dunia, Arab Saudi berusaha meningkatkan produktivitasnya dengan cara membangun lebih banyak kilang dan infrastruktur minyak lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengamankan dan

memperkuat posisinya di pasar energi global. Saudi Aramco sebagai perusahaan minyak terbesar milik Arab Saudi menjalin kemitraan dengan perusahaan minyak nasional Tiongkok yaitu *China Petroleum and Chemical Corp* atau Sinopec. Saudi Aramco memberikan sejumlah investasi terhadap fasilitas penyulingan minyak Tiongkok di Provinsi Fujian dan Yunnan sedangkan Sinopec berinvestasi dalam pembangunan Kilang Yanbu. Selain untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak, pembangunan Kilang Yanbu juga sejalan dengan kebijakan *Belt Road Initiative*. Pelaksanaan BRI telah meningkatkan keterlibatan perusahaan Tiongkok dalam berbagai pembangunan infrastruktur di Arab Saudi. Misalnya pada tahun 2009 *China Railway Construction Corporation* menandatangani kontrak sebesar \$6 miliar dengan 2 perusahaan Arab Saudi untuk membangun jalur kereta api cepat dari Mekkah ke Madinah. BRI berhasil meningkatkan hubungan Arab Saudi dan Tiongkok sehingga tidak hanya terbatas di sektor perdagangan, tetapi meluas ke bidang lain seperti konstruksi, keuangan, dan tenaga kerja asing. Pada tahun 2015, Arab Saudi bergabung ke AIIB yang dipimpin oleh Tiongkok kemudian *Industrial and Commercial Bank of China* membuka cabang pertamanya di Arab Saudi (Ehteshami & Horesh, 2020).

Secara historis, Tiongkok dan Arab Saudi telah menjalin hubungan sejak jalur sutra kuno pada abad ke-7. Namun setelah Tiongkok berubah menjadi negara komunis pada tahun 1949, Arab Saudi enggan menjalin hubungan dengan Tiongkok karena negara tersebut mendukung kelompok radikal di Yaman Selatan dan kelompok gerilya di Oman. Arab Saudi kemudian menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok pada tahun 1990. Terdapat beberapa faktor yang

menyebabkan Tiongkok dan Arab Saudi semakin dekat. Pertama yaitu peristiwa 9/11 yang menyebabkan munculnya rasisme anti-saudi di AS sehingga Arab Saudi berusaha mengurangi ketergantungannya dari negara tersebut (Nabipour, 2021). Serangan terorisme 11 September 2001 menyebabkan munculnya rasisme anti-arab yang diekspresikan melalui berbagai media. Meskipun peristiwa tersebut telah lama berlalu tetapi rasisme anti-arab di AS semakin meningkat. Salah satunya disebabkan oleh politisi AS yang sering memberikan pernyataan publik yang merendahkan orang-orang arab (Salaita, 2006). Kedua yaitu terjadinya revolusi minyak serpih AS yang menyebabkan permintaan energi negara tersebut berkurang sehingga Arab Saudi perlu mencari pasar baru untuk menggantikan posisi AS sebagai konsumen minyak terbesar. Disisi lain, permintaan energi Tiongkok semakin meningkat untuk mendukung pertumbuhan ekonominya yang pesat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan hubungan antara Tiongkok dan Arab Saudi sejalan dengan kemunduran hubungan antara Arab Saudi dan AS (Dorraj, 2020).

2.1.2. Hubungan Tiongkok dengan Iran

Hubungan Tiongkok dan Iran dapat ditelusuri sejak tahun 106 SM dimana terjadi pertukaran kedutaan antara Kekaisaran Parthia dari Iran dan Dinasti Han dari Tiongkok. Berdasarkan catatan negara-negara Arab, pada tahun 751 terjadi peperangan antara Kekhalifahan Bani Abbasiyah dengan Dinasti Tang. Kekalahan Dinasti Tang menyebabkan Tiongkok membatasi ekspansi ke wilayah barat sehingga pada masa ini jarang ditemukan interaksi antara Tiongkok dan kawasan Timur Tengah (Ehteshami & Horesh, 2020). Di era modern, Tiongkok mulai

berhubungan dengan Iran pada tahun 1911 tetapi hubungan tersebut berakhir pada tahun 1949 ketika Tiongkok dikuasai oleh Partai Komunis. Kemudian pada tahun 1971, kedua negara memutuskan untuk memulihkan hubungan diplomatik secara resmi (Saleh & Yazdanshenas, 2023). Kedekatan kedua negara dilatarbelakangi oleh adanya persamaan kekhawatiran terhadap pengaruh Uni Soviet yang semakin besar. Pada tahun 1970, Tiongkok dan Iran berada di pihak yang sama untuk memberikan dukungan kepada Pakistan dalam upayanya melawan pengaruh Uni Soviet. Pada tahun yang sama, Iran memberikan dukungan kepada Tiongkok dalam pemungutan suara untuk menggantikan posisi Taiwan di PBB. Kemudian pada tahun 1971, Tiongkok dan Iran memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik secara resmi. Reza Shah memandang kedekatan hubungan dengan Tiongkok dapat membantu Iran untuk mengeksplorasi kekayaan minyaknya melalui kerjasama berteknologi tinggi (Ehteshami & Horesh, 2020).

Selama Perang Irak-Iran (1980-1988), Tiongkok merupakan negara pemasok senjata utama ke Iran karena pada saat itu Iran sedang mendapatkan sanksi internasional atas program pengembangan nuklirnya. Sanksi tersebut meliputi sanksi politik dan ekonomi seperti pembatasan bantuan luar negeri, embargo senjata, dan pembatasan ekspor barang dengan kegunaan ganda (Laub, 2015). Beberapa senjata yang dipasok oleh Tiongkok ke Iran antara lain tank, kendaraan lapis baja, baterai artileri, rudal jelajah, rudal anti-tank, pesawat tempur, dan kapal perang kecil. Selain memasok senjata, Tiongkok juga memasok tenaga kerja dan melakukan pembangunan infrastruktur selama Perang Irak-Iran. Pada tahun 1980, Tiongkok menguasai hampir 80% penjualan senjata ke

negara-negara Timur Tengah karena Tiongkok tidak hanya memasok senjata ke Iran saja, tetapi juga ke negara lain seperti Irak, Suriah, dan wilayah konflik lainnya. Pemberian sanksi internasional masih berlanjut bahkan setelah Perang Irak-Iran berakhir. Hal ini membuat Iran terisolasi dari dunia luar, baik secara politik maupun ekonomi. Kondisi tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Tiongkok karena menjadi salah satu mitra paling penting bagi Iran (Ehteshami & Horesh, 2020).

Iran merupakan salah satu negara yang memiliki ambisi besar untuk mengembangkan program nuklir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengaruhnya serta melawan dominasi AS di Timur Tengah. Pemerintah Tiongkok secara resmi menegaskan bahwa mereka menentang program proliferasi nuklir, tetapi secara implisit memberikan dukungan kepada Iran dalam program pengembangan nuklirnya. Dari tahun 1985-1996, Tiongkok melakukan transfer teknologi dan mesin kepada Iran yang nantinya digunakan untuk menambang uranium sebagai bahan baku pembuatan nuklir. Tiongkok juga menentang pemberian sanksi internasional yang diberikan kepada Iran dengan alasan bahwa Iran memiliki hak untuk mengembangkan nuklir demi kepentingan sipil. Atas program pengembangan nuklirnya, Iran mendapatkan 4 putaran sanksi dari DK PBB. Akan tetapi, selama 3 putaran pembicaraan Iran mendapatkan dukungan dari Tiongkok. Pada tahun 1997, Tiongkok berhenti menunjukkan dukungan terhadap program pengembangan nuklir Iran karena Tiongkok berusaha mendekatkan diri kepada AS. Dalam forum *Asia Europe Meeting* tahun 2008, Pemerintah Tiongkok menegaskan komitmennya untuk mencari solusi atas

program nuklir Iran yang dinilai mengkhawatirkan. Hasil dari pertemuan ini meminta agar Iran mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1929 (Harold & Nader, 2012).

Saat ini hubungan antara Tiongkok dan Iran lebih fokus di bidang ekonomi seperti perdagangan energi dan proyek pembangunan dimana Tiongkok berperan sebagai pemberi modal. Pada tahun 2010, Tiongkok berada di urutan pertama dalam daftar mitra dagang Iran, begitu pula Iran yang telah menjadi mitra penting bagi Tiongkok di kawasan Timur Tengah. Secara keseluruhan, Iran memiliki lokasi geografis yang strategis sehingga Tiongkok merasa penting untuk menjalin hubungan bilateral dengan Iran demi keberlangsungan BRI. Iran memiliki perbatasan langsung dengan Selat Hormuz yang menghubungkan perdagangan antara negara-negara Eropa dan Asia Tengah. Berdasarkan hubungan historisnya, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjalin antara Tiongkok dan Iran sebagian besar bersifat transaksional. Tiongkok membutuhkan Iran untuk mendapatkan pasokan minyak dan mendukung pelaksanaan BRI. Sedangkan Iran membutuhkan Tiongkok untuk membantu melawan pengaruh AS di kawasan Timur Tengah (Ehteshami & Horesh, 2020). Meskipun demikian, hubungan bilateral antara Tiongkok dan Iran saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 kedua negara menandatangani perjanjian 25 tahun yang merupakan bagian dari kemitraan strategis komprehensif yang ditandatangani pada tahun 2016. CSP memungkinkan terjadinya peningkatan kerjasama antara Tiongkok dan Iran di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya (Lumsden, 2022).

2.2. Keterlibatan Tiongkok dalam Mediasi Konflik Internasional

Sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1949, Tiongkok tidak banyak terlibat dalam aktivitas resolusi konflik internasional. Tiongkok cenderung menahan diri untuk terlibat dalam urusan domestik negara lain karena Tiongkok menerapkan prinsip non-intervensi dalam kebijakan luar negerinya. Prinsip non-intervensi menjadi karakteristik utama diplomasi Tiongkok, terutama selama masa pemerintahan Mao Zedong dimana prinsip non-intervensi diterapkan secara kaku. Tiongkok lebih memilih untuk menjadi pengamat netral karena hal tersebut memberikan lebih banyak ruang untuk melakukan manuver kebijakan. Selain itu, Tiongkok lebih menyukai penggunaan diplomasi damai sehingga sebisa mungkin akan menghindari konflik terkecuali jika konflik tersebut telah mengancam kepentingan inti Tiongkok seperti keamanan nasional, kedaulatan negara, dan integritas wilayah (Chaziza, 2018).

Sebagai negara yang sedang bangkit menjadi kekuatan besar Tiongkok memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas keamanan baik di tingkat regional maupun internasional. Tiongkok diharapkan untuk berperan secara konstruktif dalam penyelesaian konflik-konflik internasional. Peran Tiongkok sangat dibutuhkan mengingat saat ini banyak terjadi konflik baru serta masih banyak konflik lama yang belum terselesaikan. Konflik-konflik tersebut pada akhirnya akan mengancam kepentingan inti Tiongkok karena kepentingan Tiongkok semakin meluas seiring dengan peningkatan statusnya sebagai negara besar. Akan tetapi, keterlibatan Tiongkok dalam konflik internasional bertentangan dengan prinsip non-intervensi yang selama ini diterapkan Tiongkok.

Akibatnya Tiongkok melakukan penyesuaian terhadap kebijakan luar negerinya dengan menerapkan prinsip non intervensi yang lebih fleksibel (Qian, 2010).

Pemerintah Tiongkok melihat bahwa satu-satunya bentuk intervensi yang sah untuk dilakukan adalah dengan menjadi mediator. Hal ini karena pelaksanaan mediasi pada dasarnya bersifat sukarela dan hasilnya tidak mengikat sehingga tidak terdapat unsur paksaan terhadap pihak manapun (Chaziza, 2018). Melalui forum *World Summit 2005*, Presiden Tiongkok Hu Jintao mendeklarasikan visi perdamaian yang mendorong negara-negara agar hidup secara berdampingan, saling bekerja sama, serta membangun dunia yang harmonis dan damai. Tiongkok yang semula memilih untuk menghindari konflik, saat ini justru menunjukkan peningkatan minat dan keterlibatan dalam resolusi konflik internasional. Tiongkok menggunakan mediasi sebagai instrumen yang sah untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan domestik negara lain. Dengan demikian, Tiongkok dapat memenuhi kewajibannya untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian konflik internasional. Tetapi pada saat yang sama tidak melanggar prinsip non intervensi yang telah menjadi karakteristik utama kebijakan luar negeri Tiongkok selama ini (Qian, 2010).

Mediasi yang dilakukan Tiongkok memiliki karakteristik unik karena berbeda dengan mediasi yang biasa dilakukan negara lain. Apabila mediasi negara-negara Barat cenderung bersifat individualistis dan utilitarian, maka mediasi Tiongkok lebih mengedepankan keharmonisan sosial, moderasi, penghormatan terhadap otoritas, dan kerendahan hati (Chaziza, 2018). Gaya mediasi Tiongkok yang unik banyak dipengaruhi oleh ajaran Taoisme dan

Konfusianisme (Qian, 2010). Taoisme merupakan filosofi cina kuno yang mengajarkan tentang harmoni dan keseimbangan antara manusia dengan alam. Untuk mencapai kondisi harmoni maka manusia harus bisa menjaga keseimbangan antara Yin dan Yang atau antara yang baik dan buruk (Mark, 2016). Sama seperti Taoisme, Konfusianisme juga mengajarkan tentang harmoni tetapi lebih menekankan pada aspek moralitas dan etika (Cartwright, 2012). Kedua filosofi tersebut pada dasarnya mengajarkan tentang keseimbangan segala sesuatu sebagai kunci dari harmoni atau keteraturan sosial. Nilai-nilai tersebut termanifestasi ke dalam kebijakan luar negeri Tiongkok sehingga Tiongkok berusaha menjaga hubungan baik dengan semua negara (Qian, 2010).

Konfusianisme beranggapan bahwa pendekatan hukum tidak efektif untuk menyelesaikan konflik. Maka dari itu, Tiongkok memilih menggunakan pendekatan orang ketiga atau mediasi dalam penyelesaian konflik internasional untuk mewujudkan tatanan global yang stabil. Tiongkok dikenal sangat berhati-hati dalam mengambil peran sebagai mediator. Tiongkok lebih sering terlibat dalam proses mediasi dimana pihak yang berkonflik memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Selain itu, mediator tidak dipilih berdasarkan profesionalitas tetapi berdasarkan kedekatan hubungan yang dimiliki dengan pihak yang berkonflik. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kemungkinan mediasi Tiongkok akan diterima secara baik oleh pihak yang bersengketa (Qian, 2010). Tiongkok juga sangat berhati-hati dalam memilih saluran mediasi apakah Tiongkok akan berperan sebagai mediator utama dalam mediasi multilateral, anggota dalam

mediasi multilateral, mediasi bilateral, mediator sampingan dalam mediasi bilateral, atau mediasi ad hoc (Chaziza, 2018).

Sejauh ini Tiongkok telah terlibat dalam berbagai proses mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik internasional. Misalnya dalam konflik nuklir Korea Utara, Tiongkok memfasilitasi beberapa perundingan sepanjang tahun 2003 sampai 2007 sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik. Ketika perundingan menemui jalan buntu, Tiongkok melakukan intervensi tingkat tinggi melalui kunjungan perdana menteri. Hasilnya Korea Utara setuju untuk menutup fasilitas nuklirnya meskipun dengan adanya imbalan bantuan bahan bakar dari Tiongkok. Contoh lain dari keterlibatan Tiongkok dalam mediasi konflik internasional dapat dilihat dalam konflik Darfur di Sudan. Tiongkok mengirimkan utusan khusus untuk menyelesaikan konflik Darfur serta memfasilitasi proses negosiasi antara Pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak. Secara lebih lanjut, keterlibatan Tiongkok sebagai mediator dalam konflik internasional dapat diamati di kawasan lain seperti Asia, Afrika, dan Timur Tengah (Qian, 2010).

2.2.1. Mediasi Tiongkok di Timur Tengah

Saat ini terdapat peningkatan keterlibatan Tiongkok dalam aktivitas penyelesaian konflik di kawasan MENA. Hal ini karena Tiongkok merupakan salah satu anggota tetap DK PBB sehingga Tiongkok juga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban internasional (Sun & Zoubir, 2018). Di sisi lain, MENA sebagai salah satu kawasan paling rawan konflik di dunia telah mengundang banyak pihak untuk melakukan intervensi di kawasan tersebut. Beberapa negara dan organisasi yang cukup sering melakukan intervensi di kawasan MENA yaitu

AS, Rusia, PBB, dan Uni Eropa. Tetapi intervensi tersebut kurang disukai oleh negara-negara MENA karena biasanya disertai dengan intervensi politik. Hal ini memberikan keuntungan bagi Tiongkok karena gaya mediasinya dianggap lebih baik dibandingkan mediasi gaya barat. Dalam melakukan mediasi, Tiongkok tidak menghilangkan prinsip non-intervensi sehingga lebih dapat diterima oleh negara-negara MENA. Mediasi Tiongkok menjadikan kekuatan lokal sebagai pelaku utama sedangkan kekuatan luar hanya sebagai pendukung. Hal ini membuat pihak yang berkonflik merasa memegang kendali sehingga meningkatkan kemungkinan tercapainya penyelesaian konflik (Chaziza, 2018).

Apabila dibandingkan dengan negara-negara Barat, Tiongkok tidak memiliki beban sejarah sehingga lebih dapat diterima oleh negara-negara Timur Tengah. Tiongkok tidak pernah melakukan penjajahan dan tidak memiliki beban agama atau politik di kawasan tersebut. Meskipun terdapat sentimen mengenai Muslim Uighur di Xinjiang tetapi negara-negara Timur Tengah tetap membutuhkan kehadiran Tiongkok di kawasan sehingga isu tersebut cenderung diabaikan. Karakteristik mediasi Tiongkok di kawasan Timur Tengah lebih mengarah pada manajemen konflik yang konstruktif daripada penyelesaian konflik. Manajemen konflik yang konstruktif dilakukan dengan cara memperkuat kerjasama dengan negara atau organisasi transnasional (Chaziza, 2018). Dalam menjalankan peran sebagai mediator, Tiongkok sangat berhati-hati dan mengedepankan prinsip non-intervensi karena tidak ingin terjebak dalam kompleksitas konflik di Timur Tengah (Ehteshami & Horesh, 2020).

Secara umum, keterlibatan Tiongkok dalam pengelolaan konflik di Timur Tengah dibagi menjadi tiga bagian yaitu mendukung konflik selama tahun 1950-1970, menghindari konflik selama tahun 1970-2000, dan meredakan konflik dari tahun 2011 hingga sekarang. Tiongkok memberikan dukungan kepada Mesir di bawah kepemimpinan Gamal Nasser untuk melawan Israel. Bentuk lain dari dukungan Tiongkok terhadap konflik Timur Tengah yaitu dengan memberikan bantuan keuangan dan militer terhadap kelompok-kelompok pemberontak. Tiongkok kemudian menyadari bahwa memberi dukungan terhadap konflik dapat memperburuk hubungannya dengan negara lain di kawasan. Setelah kematian Mao Zedong, Tiongkok melakukan perubahan terhadap kebijakan luar negerinya menjadi berorientasi pada kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan politik dan ideologi. Pada masa tersebut, Tiongkok fokus untuk meningkatkan perekonomian nasional sehingga cenderung menghindari dinamika konflik di Timur Tengah. Tetapi untuk bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya, Tiongkok membutuhkan stabilitas sehingga Tiongkok mulai aktif terlibat dalam aktivitas resolusi konflik di kawasan (Burton, 2023).

Keterlibatan Tiongkok dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah dapat diamati dari beberapa konflik seperti konflik Suriah, konflik Palestina-Israel, konflik Yaman, dan isu nuklir Iran. Keterlibatan Tiongkok dalam penyelesaian konflik Suriah antara lain menjadi tuan rumah dalam perundingan damai antara Pemerintah Suriah dan kelompok oposisi *Syrian National Coalition*, memberi dukungan penyelesaian melalui DK PBB, memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Suriah, serta menghadiri pertemuan internasional mengenai

konflik Suriah di Wina dan mendukung diadakannya *International Syria Support Group* pada tahun 2015 (Chaziza, 2018). Tingkat keterlibatan tertinggi Tiongkok adalah mengirim utusan khusus ke Suriah. Tiongkok mengirimkan beberapa utusan untuk menyelesaikan konflik Suriah. Pada tahun 2002 Tiongkok mengutus Wang Shijie pada untuk menjadi mediator dalam konflik Suriah, kemudian Sun Bigan pada tahun 2006, Wu Sike pada tahun 2009, Gong Xiao Sheng pada tahun 2014, serta Xie Xiaoyan pada tahun 2016 (Ehteshami & Horesh, 2020).

Tiongkok mulai menunjukkan peningkatan keterlibatan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina pada abad ke-21. Pada tahun 2013, Tiongkok mengajukan empat poin proposal untuk penyelesaian masalah Palestina dan pada tahun 2014 mengajukan lima poin proposal untuk mengakhiri konflik Gaza. Kemudian pada tahun 2017, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengajukan empat poin proposal untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Secara umum, keterlibatan Tiongkok dalam konflik Israel-Palestina didominasi oleh pengajuan proposal yang mana hal tersebut sebenarnya tidak berdampak besar bagi penyelesaian konflik. Tiongkok dinilai enggan memberikan sumber daya diplomatik untuk menyelesaikan konflik sehingga Tiongkok lebih banyak berkontribusi secara pasif melalui posisinya sebagai anggota tetap DK PBB (Ehteshami & Horesh, 2020).

Keterlibatan Tiongkok dalam penyelesaian konflik Yaman diimplementasikan melalui dialog politik. Sejak tahun 2015, Tiongkok telah memainkan peran konstruktif dalam menangani konflik Yaman melalui mediasi. Mantan duta besar Tiongkok untuk Yaman, Tian Qi, berpartisipasi dalam dua putaran pertama perundingan damai yang didukung oleh PBB. Utusan khusus

Tiongkok untuk Timur Tengah, Gong Xiao Sheng, juga terlibat dalam *shuttle diplomacy* terkait masalah ini. Selain itu, pada tahun 2016, Tiongkok mengundang utusan khusus PBB untuk Yaman, perwakilan pemerintah Yaman, dan pihak-pihak yang terkait untuk mengunjungi Tiongkok dan membahas upaya penyelesaian konflik (Ehteshami & Horesh, 2020).

Terakhir, Tiongkok juga terlibat dalam upaya penyelesaian isu nuklir Iran dimana Tiongkok berpartisipasi secara aktif dalam perjanjian JPOA untuk membatasi kemampuan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Berdasarkan beberapa kasus mediasi yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok terlibat dalam berbagai upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah tetapi belum pernah menjadi mediator utama. Sebagian besar keterlibatan Tiongkok dalam penyelesaian konflik di kawasan tersebut hanya sebagai kekuatan pendukung. Bahkan dalam konflik Suriah, dimana Tiongkok cukup banyak memberikan sumber daya diplomatik, Tiongkok tidak berperan sebagai mediator utama karena bukan merupakan satu-satunya negara yang terlibat sebagai mediator. Peran Tiongkok dalam penyelesaian konflik Suriah dianggap lebih terbatas daripada peran negara mediator lain seperti Rusia, AS, Turki, dan Iran (Chaziza, 2018).

2.3. Dinamika Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Iran: Eskalasi dan Resolusi Konflik

Hubungan rivalitas antara Arab Saudi dan Iran telah mendominasi pembahasan tentang Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir. Kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1928 tepatnya pada saat Abd Al-Aziz dan Reza Shah menandatangani pakta keamanan bersama dan

sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik secara formal. Hal ini kemudian disusul dengan penandatanganan perjanjian persahabatan pada 13 Agustus 1929. Hubungan antara kedua negara pada saat itu didominasi oleh koordinasi mengenai pelaksanaan haji. Kemudian pada tahun 1953 Arab Saudi dan Iran menandatangani perjanjian komersial untuk mendukung hubungan perdagangan antara kedua negara (Keynoush, 2016). Tetapi hubungan antara kedua negara mulai memburuk pasca meletusnya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Arab Saudi mempersepsikan rezim baru Iran sebagai ancaman terhadap dominasinya di kawasan. Ketegangan antara kedua negara mulai menurun pada saat Iran berada dibawah kekuasaan Presiden Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997) dan Mohammad Khatami (1997-2005) yang berambisi untuk menjalin hubungan baik dengan negara tetangga. Sayangnya, pada tahun 2005 hubungan kedua negara kembali memburuk dikarenakan Iran dipimpin oleh Mahmoud Ahmadinejad yang berhaluan keras (Humairah, 2022).

Hubungan konflikual antara Arab Saudi dan Iran sebagian besar disebabkan oleh perbedaan aliran agama, persaingan geopolitik, persaingan sumber daya energi, serta kompleksitas hubungan dengan Amerika Serikat. Data pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 96,9% masyarakat Iran beragama Islam Syiah dan 3% sisanya beragama Islam Sunni. Sedangkan di Arab Saudi, 82% masyarakatnya beragama Islam Sunni dan 17,9% beragama Islam Syiah (Statista, 2014). Perbedaan ini telah memicu berbagai ketegangan sektarian di kawasan Timur Tengah. Secara geopolitik, Arab Saudi dan Iran bersaing untuk menjadi pemimpin di kawasan Timur Tengah. Kedua negara berusaha memperluas

pengaruhnya di wilayah-wilayah yang strategis seperti Irak, Suriah, dan Yaman. Arab Saudi dan Iran cukup sering melakukan perang proksi dengan memberikan dukungan kepada kelompok yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka (Keynoush, 2016). Perang proksi merupakan perang yang dilakukan antar negara secara tidak langsung dengan memanfaatkan perang yang terjadi di wilayah lain. Negara melakukan perang proksi untuk mencapai kepentingan nasionalnya tanpa harus berkonfrontasi secara langsung dengan negara lawan (Baugh, 2024). Keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam perang proksi salah satunya dapat diamati dalam konflik Yaman dimana Arab Saudi mendukung pemerintah resmi Yaman, sedangkan Iran mendukung milisi Houthi yang merupakan kelompok oposisi berbasis syiah (Isik, 2023).

Hubungan konflikual antara Arab Saudi dan Iran juga disebabkan oleh persaingan sumber daya energi. Kedua negara seringkali terlibat dalam perebutan kepemilikan ladang minyak. Ladang minyak telah menjadi aset penting bagi kedua negara karena perekonomian mereka sangat bergantung pada penghasilan penjualan minyak (Isik, 2023). Selain itu, Arab Saudi dan Iran sering berbeda pendapat dalam menentukan harga dan kapasitas produksi minyak. Pada tahun 2019, Iran melalui milisi Houthi di Yaman melakukan serangan besar-besaran terhadap Saudi Aramco yang merupakan perusahaan minyak terbesar milik Arab Saudi. Serangan tersebut menyebabkan sebagian besar alat-alat produksi minyak Arab Saudi tidak dapat beroperasi (Shine, Guzansky, Shavit, 2023). Hubungan konflikual antara Arab Saudi dan Iran semakin diperparah oleh kompleksitas hubungan dengan AS. Arab Saudi merupakan sekutu utama AS di Timur Tengah

sedangkan Iran merupakan musuh utama AS di Timur Tengah sejak meletusnya Revolusi Islam Iran 1979 (Isik, 2023).

2.3.1. Pemutusan Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Iran

Pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran pertama kali terjadi pada tahun 1987 dimana terjadi kerusuhan besar di Mekkah yang menewaskan 402 jamaah haji dan 275 diantaranya merupakan warga negara Iran. Hal ini disusul dengan penyerangan terhadap kedutaan besar Arab Saudi yang berada di Teheran yang menewaskan Mousa'ad al-Ghamdi, Duta Besar Arab Saudi untuk Iran (Isik, 2023). Serangkaian peristiwa tersebut mendorong pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran pada April 1988. Pemulihan hubungan diplomatik dilakukan pada tahun 1991 setelah setahun sebelumnya Arab Saudi memberi bantuan kepada Iran atas bencana alam yang menimpa negara tersebut. Hubungan kedua negara semakin dekat pada tahun 1999-an karena Mohammad Khatami yang berambisi untuk memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi terpilih sebagai presiden pada tahun 1997. Khatami melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada tahun 1999 yang menjadi kunjungan pertama pejabat tinggi Iran sejak revolusi tahun 1979. Kunjungan tersebut membuahkan hasil positif dimana pada tahun 2001 kedua negara menandatangani pakta keamanan demi menjaga stabilitas keamanan kedua negara secara khusus dan keamanan kawasan secara umum. Namun, hubungan antara Arab Saudi dan Iran kembali menegang pada saat Iran dipimpin oleh Mahmoud Ahmadinejad yang berambisi untuk meningkatkan populasi syiah di

kawasan sehingga memunculkan kekhawatiran dari Pemerintah Arab Saudi (McDowall, 2016).

Arab Saudi dan Iran melakukan pemutusan hubungan diplomatik untuk yang kedua kalinya pada 3 Januari 2016. Peristiwa yang memicu terjadinya pemutusan hubungan yaitu eksekusi mati terhadap Nimr al-Nimr, seorang ulama besar Syiah sekaligus aktivis yang sangat vokal dalam mengkritik keluarga kerajaan Arab Saudi. Tidak hanya itu, pemerintah Arab Saudi juga mengeksekusi 46 orang lainnya yang diduga terlibat dalam aksi terorisme. Eksekusi tersebut menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran dari kelompok Islam Syiah di berbagai negara seperti Iran, Irak, Bahrain, Turki, Pakistan, India, Lebanon, dan Yaman. Aksi demonstrasi paling parah terjadi di Iran dimana para demonstran menyerang kantor konsulat Arab Saudi yang berada di Masyhad dan membakar kedutaan besar Arab Saudi yang berada di Teheran (United States Institute of Peace, 2023). Akibat serangan tersebut, Arab Saudi segera menarik diplomatnya dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran serta memberikan perintah kepada diplomat Iran untuk meninggalkan Arab Saudi dalam kurun waktu 48 jam (Rafsanjani, 2022).

2.3.2. Upaya Pemulihan Hubungan Diplomatik

Arab Saudi dan Iran merupakan aktor penting di kawasan Timur Tengah sehingga konflik yang terjadi antara kedua negara sangat berpengaruh terhadap stabilitas kawasan. Maka dari itu, perselisihan antara kedua negara perlu segera diselesaikan. Pemulihan hubungan antara Arab Saudi dan Iran dapat menghasilkan berbagai dampak positif seperti terwujudnya stabilitas kawasan,

keamanan regional, serta peningkatan kerjasama ekonomi antar negara (Isik, 2023). Untuk menentukan upaya penyelesaian konflik yang paling sesuai maka harus memahami sifat konflik terlebih dahulu. Konflik yang melibatkan ketegangan, kekerasan, dan telah berlangsung dalam waktu yang lama biasanya lebih sulit untuk diselesaikan. Konflik semacam ini membutuhkan bantuan dari pihak-pihak eksternal untuk melakukan intervensi dan menciptakan perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik (Webel & Galtung, 2007).

Konflik-konflik di Kawasan Timur Tengah dikenal sebagai konflik yang berkepanjangan dan sulit terselesaikan sehingga membutuhkan keterlibatan dari pihak ketiga melalui mediasi. Mediasi dianggap sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang paling ideal untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan (Vukovic, 2014). Sejak terjadinya pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran pada tahun 2016, beberapa negara di kawasan maupun luar kawasan berusaha menawarkan bantuan untuk memfasilitasi mediasi antara kedua negara. Beberapa negara yang memainkan peran signifikan dalam upaya penyelesaian konflik antara Arab Saudi dan Iran yaitu Irak, Oman, dan Tiongkok.

2.3.2.1. Mediasi Irak dan Oman (2021-2022)

Irak merupakan negara yang pertama kali melakukan mediasi konflik antara Arab Saudi dan Iran. Cikal bakal mediasi sebenarnya telah muncul sejak tahun 2019 dimana Mustafa al-Kadhimi melalui Badan Intelijen Nasional Irak berperan sebagai penghubung pesan antara Arab Saudi dan Iran. Ketika Khadimi menjadi Presiden Irak pada tahun 2020, Khadimi memfasilitasi pembicaraan antara Arab Saudi dan Iran yang bertempat di Baghdad. Dalam pembicaraan di

Baghdad pada tahun 2020, Arab Saudi dan Iran sepakat untuk melakukan pertemuan rutin pada level badan intelijen untuk saling berbagi informasi terkait keamanan (Mamouri, 2023). Kemudian pada 9 April 2021, Irak menjadi tuan rumah dalam pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Arab Saudi, Khalid al-Homeidan dan Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Saeed Iravani. Rincian mengenai pembicaraan tersebut bersifat rahasia, tetapi berdasarkan sumber informasi yang didapatkan, pembicaraan tersebut banyak membahas tentang Konflik Yaman (Younis, 2021).

Irak menyadari bahwa Arab Saudi dan Iran merupakan aktor penting yang sangat mempengaruhi stabilitas kawasan sehingga Irak mencoba melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua negara. Apalagi kedua negara telah menunjukkan peningkatan minat untuk segera menyelesaikan konflik. Irak bersedia menjadi tuan rumah mengingat konflik antara Arab Saudi dan Iran telah berlangsung untuk waktu yang lama dan kedua pihak menunjukkan niat baik yang mengarah pada pemulihan hubungan diplomatik (Cafiero, 2024). Iran bersedia melakukan pembicaraan karena Presiden Ebrahim Raisi memiliki ambisi untuk meningkatkan hubungan dengan negara tetangga; untuk mengurangi pengaruh AS di kawasan; serta untuk mengurangi dampak isolasi Iran di kawasan regional maupun internasional. Sedangkan faktor yang mendorong Arab Saudi bersedia melakukan pembicaraan yaitu keinginan untuk mengakhiri konflik di Yaman dengan milisi Houthi yang didukung oleh Iran. Sejak meletusnya Konflik Yaman pada tahun 2015, Houthi telah meluncurkan beberapa serangan ke

fasilitas-fasilitas penting Arab Saudi seperti bandara dan kilang minyak (Isik, 2023).

Awalnya Arab Saudi dan Iran menyangkal bahwa mereka telah melakukan pembicaraan di Baghdad, tetapi akhirnya kedua negara mengakui telah melakukan pembicaraan. Berdasarkan informasi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, kedua negara berfokus pada pembicaraan tentang isu-isu bilateral dan regional. Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negerinya berharap bahwa pembicaraan ini akan berhasil, tetapi mereka beranggapan bahwa masih terlalu awal untuk berspekulasi. Sampai tahun 2022, Arab Saudi dan Iran telah melakukan 5 putaran pembicaraan yang sebagian besar dimediasi oleh Irak. Akan tetapi, mediasi terhenti pada pembicaraan putaran ke-5 (Younis, 2021). Hal ini salah satunya dipicu oleh kerusuhan massa di Iran pasca kematian Mahsa Amini pada 16 September 2022. Iran menuduh Arab Saudi menghasut massa untuk melakukan protes anti pemerintah di Iran. Akibatnya, diplomat Iran menolak untuk bertemu dengan diplomat Arab Saudi di tengah-tengah aksi protes tersebut (United States Institute of Peace, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa Irak hanya memiliki sedikit kendali atas Arab Saudi dan Iran sehingga gejolak politik di tingkat regional maupun global dapat dengan mudah meningkatkan ketegangan antara kedua negara dan menggagalkan upaya mediasi yang telah dibangun oleh Irak (Mamouri, 2023). Selain Irak, Kesultanan Oman juga berkontribusi dalam proses mediasi konflik antara Arab Saudi dan Iran. Oman yang dipimpin oleh Haitham bin Tariq Al Said mengambil peran sebagai mediator dan fasilitator. Berbeda dengan Irak, Oman lebih banyak

berkontribusi di belakang layar untuk meredakan ketegangan antara kedua negara (Barthe, 2023). Meskipun pada akhirnya menemui kegagalan, tetapi mediasi yang difasilitasi oleh Irak dan Oman telah membangun pondasi yang kuat bagi pemulihan hubungan Arab Saudi dan Iran di kemudian hari. Dalam pernyataan bersama di Beijing, kedua negara mengucapkan terima kasih kepada Irak dan Oman atas bantuan mediasi yang telah diberikan sehingga kedua negara dapat mencapai kesepakatan dan melakukan pemulihan hubungan diplomatik (Mamouri, 2023).

2.3.2.2. Mediasi Tiongkok (2023)

Pada 10 Maret 2023, Arab Saudi dan Iran mengumumkan bahwa kedua negara memutuskan untuk melakukan pemulihan hubungan diplomatik. Secara tidak terduga, Tiongkok muncul sebagai pihak yang memfasilitasi mediasi antara Arab Saudi dan Iran. Tiongkok telah menjadi tuan rumah dalam pembicaraan rahasia selama 4 hari antara pejabat tinggi kedua negara, memfasilitasi kesepakatan, serta bergabung dalam pernyataan bersama yang mengumumkan kesepakatan pemulihan hubungan (Isik, 2023). Dalam pernyataan trilateral tersebut, Arab Saudi dan Iran sepakat untuk membuka kembali kantor kedutaan; menghormati Perjanjian Kerjasama Keamanan Tahun 2002 dan Perjanjian Kerjasama di Bidang Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Teknologi, Ilmu Pengetahuan, Budaya, Olahraga dan Pemuda Tahun 1998; berkomitmen untuk menghindari campur tangan terhadap urusan internal masing-masing negara; serta aktif terlibat dalam negosiasi permasalahan bilateral atau regional khususnya yang

berkaitan dengan keamanan dan stabilitas kawasan (Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 2023).

Pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran menjadi pencapaian besar bagi mediasi konflik Tiongkok di Timur Tengah. Tiongkok memiliki hubungan yang cukup dekat dengan kedua negara, baik di bidang politik maupun ekonomi. Pada tahun 2016, Tiongkok menjalin kemitraan komprehensif strategis dengan Arab Saudi dan Iran yang memungkinkan negara-negara tersebut untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, infrastruktur, pertahanan, dan keamanan (Isik, 2023). Berdasarkan sejarah hubungannya, Tiongkok berusaha menerapkan kebijakan yang seimbang dan hati-hati terhadap kedua negara sehingga Tiongkok berpotensi untuk menjadi mediator yang efektif dalam konflik Arab Saudi dan Iran (Mamouri, 2023).

Tabel 2.1. Dinamika Hubungan Arab Saudi dan Iran

Tahun	Dinamika Hubungan
1979	Revolusi Islam Iran yang menggulingkan rezim Mohammad Reza Pahlavi dan mengubah bentuk pemerintahan Iran menjadi republik.
1984	Iran menyerang kapal minyak milik Arab Saudi.
1987	- Kerusuhan di Mekkah yang menewaskan 275 jamaah haji dari Iran. - Aksi demonstrasi di Teheran menewaskan Mousa'ad al-Ghamdi, Duta Besar Arab Saudi untuk Iran.
April 1988	Raja Arab Saudi, Fahd bin Abdul Aziz Al-Saud, mengumumkan keputusan hubungan diplomatik dengan Iran.
1990	Arab Saudi memberikan bantuan kepada Iran pasca terjadinya gempa bumi yang menewaskan 40.000 orang.
1991	Arab Saudi dan Iran melakukan pemulihan hubungan diplomatik.
1999	Presiden Iran, Mohammad Khatami bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama setelah revolusi tahun 1979.
2001	Arab Saudi dan Iran menandatangani pakta keamanan mengenai terorisme dan perdagangan narkoba.
2011	Arab Spring berkontribusi dalam meningkatnya ketegangan hubungan antara Arab Saudi dan Iran.
2014	Kerajaan Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati kepada Nimr al Nimr.
Juli 2015	Iran dan 5 negara anggota tetap DK PBB menyepakati JPOA untuk menangani program nuklir Iran.
September 2015	Kerusuhan di Mina yang menewaskan 2.000 jamaah haji, termasuk ratusan warga negara Iran.
2016	- Arab Saudi melakukan eksekusi mati terhadap Nimr al Nimr. - Demonstrasi di kantor konsulat dan kedutaan besar

	Arab Saudi yang terletak di Masyhad dan Teheran.
	- Arab Saudi mengumumkan keputusan hubungan diplomatik dengan Iran.
Mei 2017	Pejabat pemerintah Pakistan, Indonesia, Kazakh, dan Rusia menawarkan untuk menjadi mediator antara Arab Saudi dan Iran.
2019	Serangan besar-besaran terhadap perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco. fasilitas Abqaiq dan Khurais milik Saudi Aramco pada September 2019.
2021-2022	Arab Saudi dan Iran melakukan 5 putaran pembicaraan yang difasilitasi oleh Irak dan Oman.
10 Maret 2023	Kedua negara mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik dibawah mediasi yang difasilitasi oleh Tiongkok.

Sumber: Data diolah peneliti dari berbagai sumber, 2024